



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

# RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PDASRH

T A . 2 0 2 3



DI SUSUN OLEH

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS  
DAN REHABILITASI HUTAN



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN**

NOMOR: SK.42/PDASRH/SET/SET.0/11/2022

**TENTANG  
RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH  
ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI  
DAN HUTAN LINDUNG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;

b. bahwa Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

c. bahwa sehubungan huruf a. dan huruf b., maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Tahun 2022.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1 /8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. /MENLHK/SETJEN /SET.1/9/2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Nomor: SK.12/PDASRH/SET/REN.0/3/2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian DAS Dan Hutan Lindung Nomor: SK.30/PDASHL/SET/REN.0/9/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian DAS Dan Hutan Lindung Tahun 2020 -2024

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN TAHUN 2023

#### Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Tahun 2023 menjadi acuan Penyusunan Rencana Kerja Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan.

#### Pasal 3 .....

### **Pasal 3**

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Tahun 2023 menjadi arahan dalam penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan.

### **Pasal 4**

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Tahun 2023 ini merupakan penyesuaian sasaran dan indikator sesuai dengan Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, serta dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Tahun 2023.

### **Pasal 5**

Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal: 11 November 2022

**DIREKTUR JENDERAL,**

**Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum.  
NIP. 19690802 198803 2 001**

## **Kata Pengantar**

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengacu pada tema rencana kerja pemerintah tahun 2023. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Renja ini merupakan perencanaan mikro yang bersifat tahunan yang menjabarkan tujuan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta program, kegiatan pokok dan indikator kinerja unit kerja.

Rencana Kerja ini merupakan upaya pemenuhan sasaran prioritas nasional dengan kebijakan anggaran berdasarkan pada *Money Follow Programs*, serta pendekatan yang Holistik, Integratif, Tematik Dan Spasial (HITS). Kebijakan anggaran belanja berdasarkan *Money Follow Programs* pada sistem penganggaran dan kegiatan Kementerian/Lembaga di Indonesia senantiasa memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung pembangunan nasional. Hal ini turut dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan.

Melalui Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Tahun 2023 ini, diharapkan dapat mendukung secara optimal pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta dapat berperan dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemic Covid-19.

Diharapkan apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh elemen lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan guna mendukung pelaksanaan target kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Tahun 2023.

Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum.

NIP. 19690802 198803 2 001



## **Daftar Isi**

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar .....	iv
I. Pendahuluan .....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
1. Kedudukan .....	6
2. Tugas.....	7
3. Fungsi .....	7
C. Struktur Organisasi dan SDM .....	8
II. Capaian Kinerja Ditjen PDASRH .....	9
A. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun Anggaran 2021 .....	9
1. IKP1. Luas Tutupan Hutan Dan Lahan Hasil Rehabilitasi .....	10
2. IKP2. Menurunnya Persentase Lahan Kritis di DAS Prioritas .....	11
3. IKP3. Meningkatnya Pengelolaan Hutan Lindung di Tingkat Tapak Secara Lestari .....	11
4. IKP4. Jumlah Produksi HHBK Dari Hutan Lindung .....	12
5. IKP5. Jumlah Danau Yang Dikendalikan Kerusakannya .....	12
B. Capaian Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2022.....	14
III. Rencana Tahun 2023 .....	15
A. Program dan Kegiatan .....	15
1. Pilar pembangunan .....	15
2. Program .....	16
3. Kegiatan.....	18
B. Anggaran.....	29
1. Sekretariat Direktorat Jenderal.....	31
2. Direktorat Konservasi Tanah dan Air.....	32
3. Direktorat Rehabilitasi Hutan .....	33
4. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan.....	34
5. Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai .....	35

6.	Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove.....	36
C.	Pengarusutamaan.....	41
D.	Dukungan Pembangunan Nasional.....	42
E.	Anggaran Berbasis Masyarakat.....	43
IV.	Penutup.....	44

## **Daftar Tabel**

Tabel 1. Peta Sasaran Kinerja Ditjen PDASRH .....	17
Tabel 2. Peta Sasaran Kinerja Ditjen PDASRH .....	17
Tabel 4. Kegiatan, KRO dan RO .....	20
Tabel 5. Pagu Alokasi Anggaran per Rincian Output .....	38

## **Daftar Gambar**

Gambar 1. Struktut Organisasi Ditjen PDASRH.....	8
Gambar 2. Anggaran Per Jenis Belanja .....	30
Gambar 3. Anggaran Per Sumber Dana.....	30
Gambar 4. Anggaran Per Program.....	30

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dan merupakan periode akhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024 yang menentukan titik dorong menuju Rencana Jangka Panjang 2025-2045 (Visi Indonesia Maju). Pada tahun ini juga merupakan tahun kedua pasca pandemi atau endemic Covid-19 atau yang memberikan dampak yang besar pada kondisi perekonomian dalam negeri. Selain itu juga ada dampak dari kondisi global yang tidak stabil akibat perang ikut berimbang pada kondisi ekonomi di Indonesia.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 ialah “Produktivitas Tapak Hutan dan Lingkungan Hidup Untuk Transformasi Ekonomi Indonesia”. Tahun 2023 diharapkan menjadi tahun kedua untuk Indonesia mulai lepas dari tekanan COVID-19 sehingga tahun 2023 merupakan Tahun Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Namun demikian tantangan Indonesia tidak saja Pemulihan Ekonomi Nasional, namun juga Transformasi Ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang.

Berbagai program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2023 diarahkan untuk sepenuhnya menjadi bagian inti dari akselerasi pemulihian ekonomi nasional, diantaranya melalui penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produksi dan ekspor hasil hutan dan jasa lingkungan, menjamin investasi yang ramah dan tidak melampaui ambang batas lingkungan, penurunan kesenjangan antar wilayah dan penguatan peran masyarakat dalam mengakses potensi sumber daya hutan dan lingkungan.

Seiring dengan dampak eksternalitas yang diharapkan melalui intervensi program KLHK di tahun 2023, aspek reformasi struktural dan penguatan internal manajemen juga perlu menjadi perhatian. Penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan di KLHK harus dipastikan efektifitas dan kebermanfaatannya. Peningkatan kualitas layanan birokrasi pada semua lini dari level terendah sampai tertinggi harus seirama dalam menuju komitmen yang tertuang dalam sasaran strategis.

Ditjen PDASRH menyelaraskan Produktivitas Tapak Hutan dan Lingkungan Hidup Untuk Transformasi Ekonomi dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Ditjen PDASRH. Perencanaan kegiatan dengan tujuan peningkatan produktivitas tapak menjadi peran penting Ditjen PDASRH dalam mendukung tema rencana kerja KLHK. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PDASRH selama ini bersifat padat karya dalam upaya mendukung produktivitas tapak hutan dan lingkungan

hidup melalui kegiatan pemulihan fungsi hutan dan lahan dengan kegiatan RHL, Penyediaan Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif, serta pembuatan bangunan KTA.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditetapkan tugas dan fungsi unit organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di lingkup pusat termasuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH).

### **1. Kedudukan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang PDASRH, Ditjen PDASRH sesuai dengan landasan hukum yang meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan ekosistemnya;
- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS;
- k) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
- l) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- n) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
- o) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. /MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023;

- p) Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor: SK.30/PDASHL/SET/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 2020 -2024

## **2. Tugas**

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Ditjen PDASRH mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan.

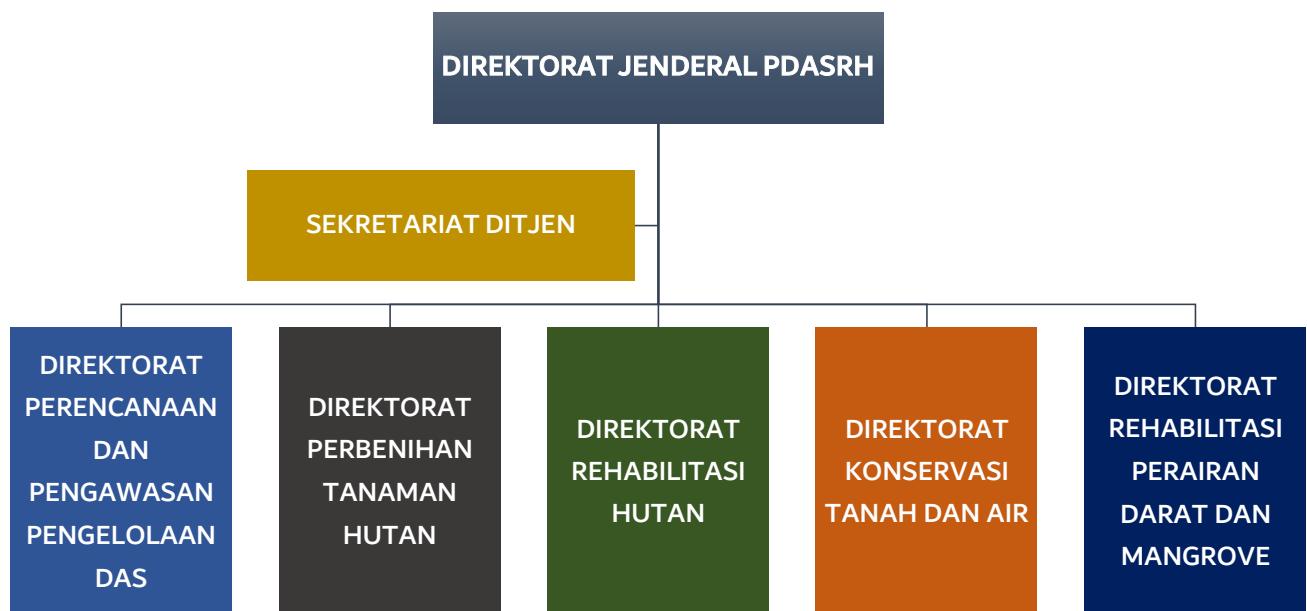
## **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas Ditjen PDASRH menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
- d) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
- e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
- g) Pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## C. Struktur Organisasi dan SDM

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dibantu oleh 6 (enam) pejabat Eselon II, yaitu Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS, Direktur Konservasi Tanah dan Air, Direktur Perbenihan Tanaman Hutan, Direktur Rehabilitasi Hutan dan Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove serta Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan. Struktur organisasi Ditjen PDASRH disajikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktut Organisasi Ditjen PDASRH

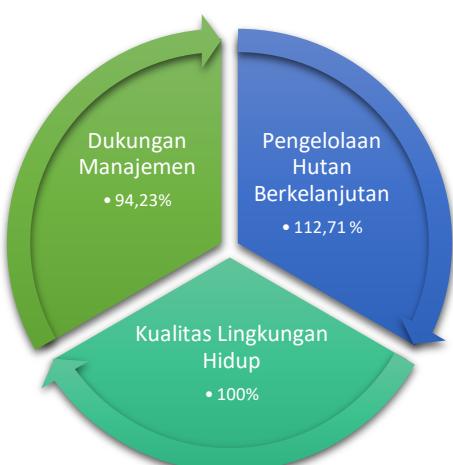
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, guna mengoptimalkan tugas pelayanan pembangunan bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan di daerah, Ditjen PDASRH mempunyai 36 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu 34 UPT Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) serta 2 UPT Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH).

## II. Capaian Kinerja Ditjen PDASRH

### A. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Pengukuran capaian kinerja Ditjen PDASRH melalui 3 (tiga) program yang dilaksanakan di tahun 2021 dihitung dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja program (IKP) yang mendukung masing-masing capaian sasaran program. Mengacu pada perjanjian kinerja tahun 2021, maka kinerja Ditjen PDASRH dihasilkan dari 6 (enam) IKP yang mendukung 6 (enam) sasaran program. Dengan perhitungan kinerja yang dilakukan dapat diketahui bahwa Nilai kinerja Ditjen PDASRH secara keseluruhan tahun 2021 adalah sebesar 116,07%. Sebanyak 3 (tiga) IKP yang mendukung sasaran program memiliki capaian kinerja lebih dari 100%, sebanyak satu IKP dengan capaian kinerja 100% dan sebanyak satu IKP yang capaian kinerjanya kurang dari 100%.

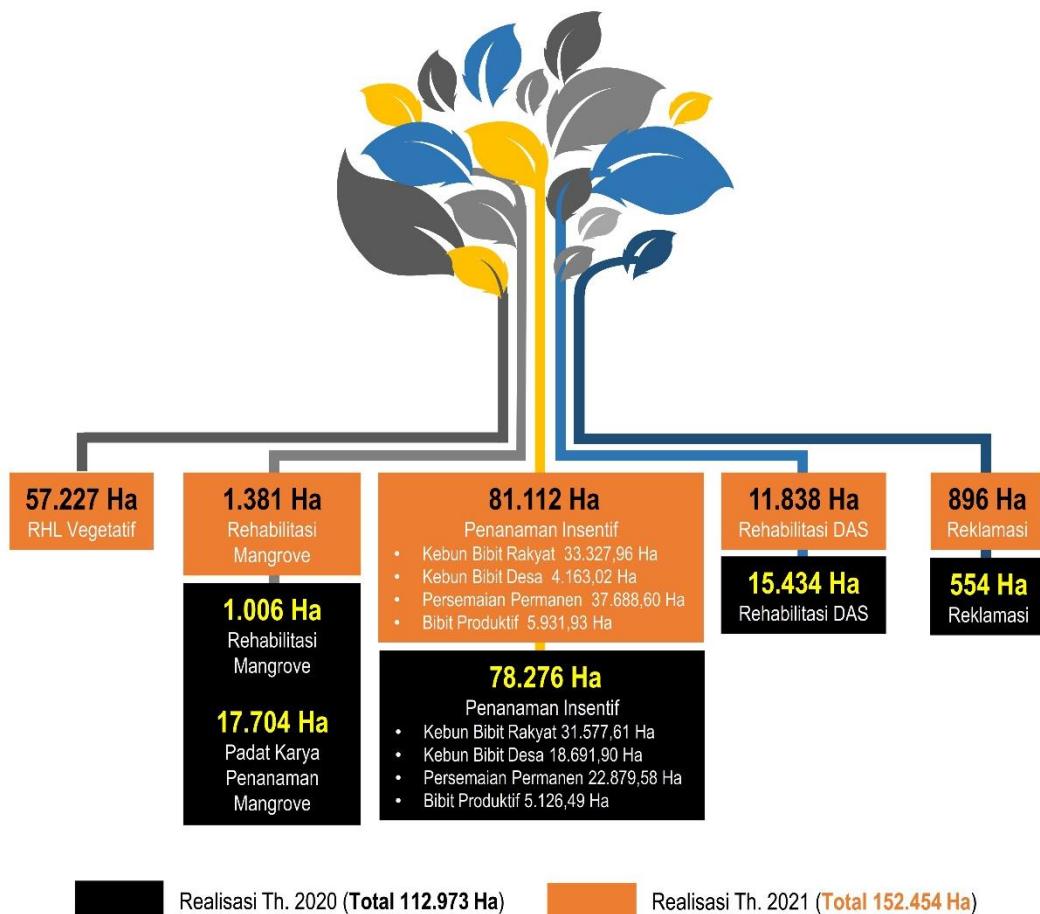
Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya luas penutupan vegetasi	Luas Tutupan Hutan dan Lahan Hasil Rehabilitasi	Ha	56.000	57.227	102,19
	Pulihnya kondisi lahan dalam DAS	Menurunnya persentase lahan kritis di dalam DAS	Persen	7,94	5,45	68,64
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan	Jumlah produksi HHBK dari hutan lindung	Ton	2.700	681.483	150,00 (> 150)
	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari	Jumlah KPHL dengan kategori Maju	KPH	10	13	130,00
Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas perairan darat	Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya	Danau	15	15	100,00
Dukungan Manajemen	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PDASHL	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat Jenderal PDASHL	Poin	77	72,56	94,23



Jika dilihat dari rata-rata capaian indikator kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2021, maka capaian kinerja program pengelolaan hutan berkelanjutan memiliki capaian kinerja tertinggi yaitu sebesar 112,71 % jika dibandingkan dengan capaian kinerja program kualitas lingkungan hidup maupun program dukungan manajemen.

## 1. IKP1. Luas Tutupan Hutan Dan Lahan Hasil Rehabilitasi

Sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana kerja tahun 2021 target RHL adalah seluas 56.000 Ha. Untuk pelaksanaan penanamannya merupakan keberlanjutan dari pencapaian kinerja di tahun 2020 berupa penyediaan bibit untuk penanaman. Dari RHL yang telah dilakukan dapat terealisasi seluas 57.227 Ha, yang terdiri dari penanaman dari penyediaan bibit tahun 2020 seluas 55.852 Ha dan penanaman murni tahun 2021 seluas 1.375 Ha dari optimalisasi anggaran yang ada. Sehingga capaian kinerja untuk IKP1 sebesar 102,19 %.



## 2. IKP2. Menurunnya Persentase Lahan Kritis di DAS Prioritas



Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan serta konservasi tanah dan air secara vegetatif (tidak termasuk rehabilitasi mangrove) di tahun 2021 terealisasi seluas 151.073 Ha. Untuk pembangunan sipil teknis telah terbangun sebanyak 1.554 Unit yang terdiri dari Dam Penahan sebanyak 391 Unit dan Gully Plug sebanyak 1.163 Unit.

Melalui kegiatan RHL secara vegetatif yang dilakukan, pada tahun 2021 telah berhasil menurunkan persentase lahan kritis sebesar 5,45%. Sehingga capaian kinerja untuk IKP2 tahun 2021 hanya sebesar 68,67 %. Capaian kinerja tahun 2021 lebih rendah jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 yaitu sebesar 104,74 %.

Jika dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024, selama periode dua tahun telah berhasil menurunkan lahan kritis komulatif sebesar 11,09 % dari target penurunan lahan kritis total sebesar 37,56 %. Ditjen PDASRH tetap optimis untuk pencapaian target kinerja selama lima tahun.

## 3. IKP3. Meningkatnya Pengelolaan Hutan Lindung di Tingkat Tapak Secara Lestari

Untuk menilai sejauh mana keberhasilan fasilitasi atau intervensi yang telah diberikan, maka perlu dilakukan penilaian atas kinerja KPHL itu sendiri. Penilaian status KPHL mencakup tiga kriteria, yaitu aspek managemen dengan bobot 20%, prakondisi teknis dengan bobot 30% serta tata kelola kehutanan yang memiliki bobot terbesar 50%.

Pencapaian IKP3 berupa jumlah KPHL dengan kategori maju pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 13 KPHL dari target 10 KPHL atau sebesar 130 %. Jika dibandingkan dengan persentase pencapaian kinerja tahun 2020, kinerja tahun 2021 mengalami penurunan. Apabila diproyeksikan dengan target Renstra 2020- 2024, maka capaian IKP3 ini bisa dikategorikan dapat berjalan dengan baik karena capaian kinerja sampai dengan tahun ke dua telah tercapai sebesar 54,00 % atau sebanyak 27 KPHL dari target total sebanyak 50 KPHL dengan kategori maju . Namun demikian adanya Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK yang baru sesuai Peraturan Menteri LHK nomor 15 tahun 2021, memungkinkan pada tahun berikutnya akan ada perubahan IKP



terkait jumlah KPHL dengan kategori maju. Perubahan tersebut disebabkan karena Ditjen PDASHL yang berubah menjadi Ditjen PDASRH tidak lagi memiliki Direktorat KPHL yang memiliki tusi dalam pengelolaan KPHL.

#### 4. IKP4. Jumlah Produksi HHBK Dari Hutan Lindung



Pencapaian IKP4 berupa jumlah produksi HHBK dari Hutan Lindung pada dasarnya merupakan hasil dari berbagai kegiatan pengelolaan hutan baik yang diintervensi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam rangka mencapai produksi HHBK di hutan lindung sebanyak 2.700 ton pada tahun 2021, terdapat fasilitasi untuk kegiatan pemanfaatan HHBK. Realisasi dari target pungutan HHBK tersebut dapat terpenuhi sebanyak 681.483 Ton atau lebih besar dari 150% (dibatasi maksimum 150%) dengan nilai kewajiban PNBP sebesar Rp. 35,338 Miliar. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, maka kinerja tahun 2021 tetap, karena capaian kinerja tahun 2020 juga sebesar 150%. Apabila diproyeksikan dengan target Renstra 2020-2024, maka capaian IKP4 ini sudah bisa terpenuhi sampai dengan tahun ke dua, karena pencapaian target IKP4 selama lima hanya sebesar 15.000 Ton.

#### 5. IKP5. Jumlah Danau Yang Dikendalikan Kerusakannya

Pencapaian kinerja IKP-5 yaitu jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya di tahun 2021 terealisasi sebesar 100%. Dari target 15 danau yang diintervensi mampu terealisasi seluruhnya. Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya maka kinerjanya tetap. Dan apabila capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 dibandingkan dengan target capaian dalam Renstra 2020-2024, maka terealisasi sebesar 40% atau sesuai dengan target sampai dengan pelaksanaan di tahun kedua.

Jenis dan jumlah intervensi untuk masing-masing danau tentu saja tidak sama, tetapi disesuaikan dengan kondisi fisik dan anggaran yang tersedia. Adanya refocusing anggaran tahun 2021, kegiatan pengendalian kerusakan danau dan segmen sungai yang berhasil dilakukan adalah pemantauan capaian target rencana pengelolaan danau dilakukan pada 13 danau, penyusunan peta DTA danau prioritas dilakukan pada 10 danau, identifikasi dan penilaian



kerusakan sempadan sungai pada 6 danau serta alih usaha penyelamatan danau pada 2 danau.

Penyusunan peta DTA danau prioritas nasional dimaksudkan untuk mendapatkan batas-batas DTA danau yang dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian kerusakan danau, khususnya upaya-upaya rehabilitasi baik dalam bentuk vegetatif maupun sipil teknis.

#### **IKP6. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) Pada Ditjen PDASHL**



Capaian kinerja kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal PDASHL pada tahun 2021, melalui indikator terjaminnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal PDASHL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: Sakip dengan nilai minimal 77,00 (A), level maturitas SPIP dengan nilai

minimal level 3 dan Laporan Keuangan Ditjen PDASHL yang tertib dan akuntabel dengan target 1 Laporan di tahun 2021. Dari target SAKIP sebesar 77,00 poin terealisasi sebesar 72,56 poin, target level maturitas juga terealisir di

level 3 dengan nilai 3,78 dan target penyelesaian laporan

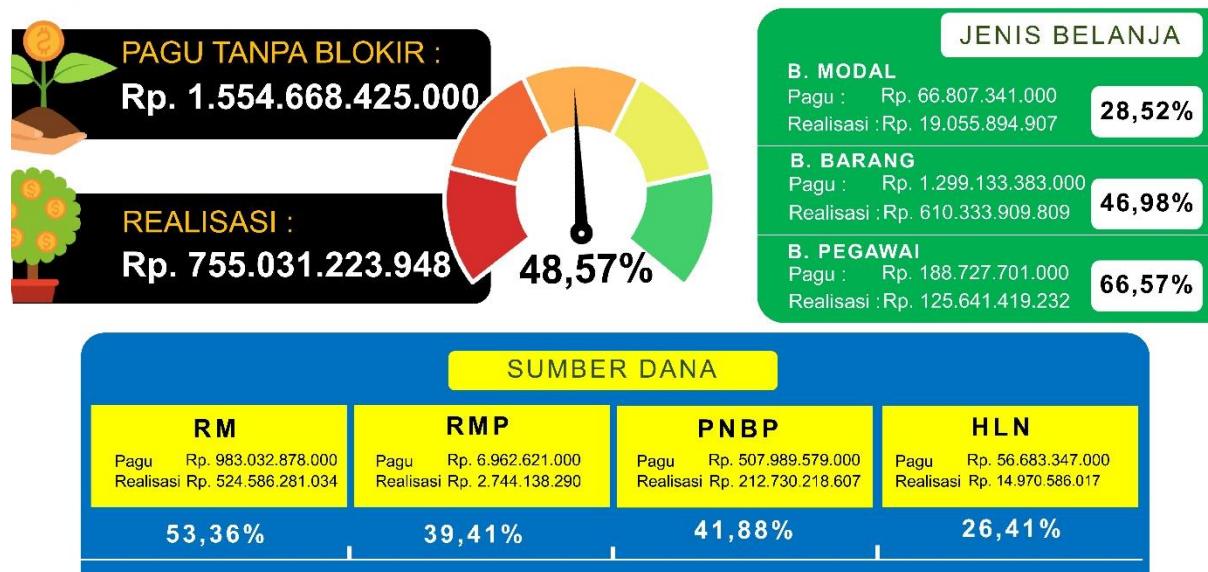
keuangan Ditjen PDASHL dapat terealisasi sebesar 1 laporan di tahun 2021. Realisasi SAKIP mengacu pada hasil evaluasi oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian LHK pada tahun 2021.

Dengan melihat trend capaian kinerja setiap tahun dan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PDASHL, maka perbaikan yang dilakukan tahun 2021 antara lain:

1. Penguatan komponen perencanaan kinerja dengan melakukan reviu Renstra atas kriteria ukuran keberhasilan yang baik.
2. Pengukuran kinerja atas rencana aksi digunakan sebagai pengendalian dan pemantauan secara berkala.
3. Pada komponen pelaporan kinerja sudah dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
4. Informasi kinerja sudah dapat diandalkan, dengan adanya perhitungan yang valid.

## B. Capaian Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2022

Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2022 adalah capaian kinerja hingga Triwulan III tahun 2022. Adapun Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PDASRH Tahun 2022 sebesar Rp. 1.554.668.425.000,- dan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 755.031.223.948,- atau mencapai 48,57%. Secara lengkap capaian kinerja anggaran tahun 2022 sampai dengan Triwulan III adalah sebagai berikut.



### **III. Rencana Tahun 2023**

#### **A. Program dan Kegiatan**

##### **1. Pilar pembangunan**

Sejalan dengan tema RKP Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan BerkelaJutan” dan Tema Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu “Produktivitas Tapak Hutan dan Lingkungan Hidup Untuk Transformasi Ekonomi Indonesia” maka Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan mengusung tema “Peningkatan Fungsi Hutan dan Lahan Dalam Mendukung Produktivitas Tapak Hutan dan Lingkungan Hidup Untuk Transformasi Ekonomi Indonesia”.

Terdapat Empat Pilar Pembangunan yang diusung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rencana Kerja Tahun 2023 yaitu Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi, Pilar Sosial dan Pilar Tata Kelola.

**Pilar Lingkungan** memiliki sasaran strategis: “Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim”. Pencapaiannya dilakukan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, penurunan emisi, menjaga laju penyusutan hutan, peningkatan kinerja pengelolaan sampah, pemulihan DAS, dan perlindungan kawasan dengan nilai konservasi tinggi.

**Pilar ekonomi** memiliki sasaran strategis: “Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan”. Pencapaiannya dilakukan melalui peningkatan sumbangan LHK pada produk domestik bruto (PDB), meningkatkan ekspor hasil hutan, dan meningkatkan sumbangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

**Pilar sosial** memiliki sasaran strategis: “Terjadinya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelaJutan”. Pencapaiannya dilakukan melalui peningkatan upaya pemantapan kawasan hutan, melanjutkan capaian tanah obyek reforma agraria dari kawasan hutan, dan akses kelola hutan kepada masyarakat.

**Pilar tata kelola** memiliki sasaran strategis: “Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing”. Pencapaiannya dilakukan melalui peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan hutan, penanganan kasus LHK melalui penegakan hukum, peningkatan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, hasil litbang yang inovatif dan diimplementasikan, peningkatan produktivitas dan daya saing SDM LHK, reformasi birokrasi, akuntabilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern pemerintah yang semakin matang.

## **2. Program**

Sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Nomor: SK.12/PDASRH/SET/REN.0/3/2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian DAS Dan Hutan Lindung Nomor: SK.30/PDASHL/SET/REN.0/9/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian DAS Dan Hutan Lindung Tahun 2020 -2024, Ditjen PDASRH mengampu tiga program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu:

### **1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**

Arah program ini adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa. Meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi

### **2. Program Kualitas Lingkungan Hidup**

Arah program ini adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, menerapkan standar pengelolaan lingkungan hidup sembari memanfaatkan potensi sampah dan limbah B3 untuk kesejahteraan masyarakat.

### **3. Program Dukungan Manajemen**

Arah program ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan transformasi pelayanan publik sebagai upaya peningkatan reformasi birokrasi dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pada Revisi Renstra KLHK terdapat transformasi Arsitektur Kinerja lingkup Kementerian LHK. Arsitektur kinerja pada Renstra Kementerian LHK 2020-2024 (Revisi), Kementerian LHK memiliki 4 (empat) Tujuan yang akan dicapai melalui 13 (tiga belas) Sasaran Strategis yang diukur keberhasilannya dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KLHK serta Sasaran Program, Indikator Kinerja Program Ditjen PDASRH juga Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dari Eselon II Ditjen PDASRH, maka dapat disusun peta sasaran program dan sasaran kegiatan (*cascading*) Ditjen PDASRH Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) diperlukan untuk menggambarkan struktur keselarasan kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis KLHK, Sasaran Program Ditjen PDASRH serta Sasaran Kegiatan Unit Kerja Eselon II yang dinilai tepat untuk dilakukan pencapaian.

Tabel 1. Peta Sasaran Kinerja Ditjen PDASRH

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	TARGET RENSTRA
						2023
Kualitas Lingkungan Hidup	T1.S1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	T1.S1.1 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	T1.S1.1.12 Meningkatnya Pengelolaan Danau Prioritas Nasional	T1.S1.1.12.1 Jumlah danau prioritas nasional yang dikendalikan kerusakannya	Danau	15
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	T1.S4.1.3 Meningkatnya tutupan hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai	T1.S4.1.3.1 Luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi	Hektar	230.000
Dukungan Manajemen	T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.3.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	Poin	79

Tabel 2. Peta Sasaran Kinerja Ditjen PDASRH

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKU/IKP/ IKK)	Satuan	TARGET RENSTRA			
				2023			
<b>PROGRAM 029.WA : DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
<b>KEGIATAN 5403 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGENDALIAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN</b>							
T4.S2.1.1.3 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	T4.S2.1.1.3.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan		Poin	79			
	T4.S2.1.1.3.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan		Level	4			
	T4.S2.1.1.3.3 Laporan Keuangan Ditjen Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan yang tertib dan akuntabel		Dokumen	1			
<b>PROGRAM 029.FF : PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN</b>							
<b>KEGIATAN 6734 : KONSERVASI TANAH DAN AIR</b>							
T1.S4.1.3.1.1 Meningkatnya luas lahan yang direhabilitasi akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan	T1.S4.1.3.1.2.1 Luas lahan reklamasi dan rehabilitasi DAS akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan		Hektar	15.000			
	T1.S4.1.3.1.2 Menurunnya sedimentasi dalam DAS	T1.S4.1.3.1.2.1 Jumlah bangunan konservasi tanah dan air	Unit	7.588			
<b>KEGIATAN 6735 : PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>							
	T1.S4.1.3.1.3 Tersedianya informasi baseline DAS	T1.S4.1.3.1.3.1 Jumlah informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS	DAS	108			

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKU/IKP/ IKK)	Satuan	TARGET RENSTRA	
				2023	
		rawan bencana untuk mendukung sistem informasi DAS real time			
		T1.S4.1.3.1.3.2 Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya	Lembaga /forum	34	
<b>KEGIATAN 6736 : REHABILITASI HUTAN</b>					
	T1.S4.1.3.1.4 Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan secara vegetatif	T1.S4.1.3.1.4.1 Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Hektar	230.000	
		T1.S4.1.3.1.4.2 Luasan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS Sekitarnya	Hektar	3.000	
<b>KEGIATAN 6737 : REHABILITASI MANGROVE</b>					
	T1.S4.1.3.1.5 Meningkatnya kualitas ekosistem mangrove	T1.S4.1.3.1.5.1 Luas ekosistem mangrove yang direhabilitasi	Hektar	1.250	
		T1.S4.1.3.1.5.2 Jumlah lembaga/forum peduli Mangrove yang meningkat kapasitasnya	Lembaga /forum	34	
<b>KEGIATAN 5607 : PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN</b>					
	T1.S4.1.3.1.6 Meningkatnya kualitas dan distribusi perbenihan tanaman hutan	T1.S4.1.3.1.6.1 Luas sumber benih unggul yang dibangun	Hektar	120	
		T1.S4.1.3.1.6.2 Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif	Batang	67,5 Juta	
		T1.S4.1.3.1.6.3 Jumlah benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat	Butir	65 Juta	
<b>PROGRAM 029.FD : KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>					
<b>KEGIATAN 6738 : REHABILITASI PERAIRAN DARAT</b>					
	T1.S1.1.12.1.1 Meningkatnya kualitas mata air, danau, dan sungai beserta ekosistemnya pada DAS prioritas	T1.S1.1.12.1.1.1 Jumlah mata air yang memiliki rencana pemulihannya	Mata Air	150	
		T1.S1.1.12.1.1.2 Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya	Danau	15	
		T1.S1.1.12.1.1.3 Jumlah bangunan pengendalian kerusakan perairan darat	Unit	470	

### 3. Kegiatan

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Program Ditjen PDASRH sebagaimana tersebut diatas, maka disusun Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh eselon II lingkup Ditjen PDASRH. Adapun kegiatan per Program pada Ditjen PDASRH antara lain sebagai berikut:

Pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, terdapat lima kegiatan antara lain yaitu:

1. Kegiatan Konservasi Tanah dan Air;

2. Kegiatan Rehabilitasi Hutan;
3. Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
4. Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan; dan
5. Kegiatan Rehabilitasi Mangrove;

Pada Program Kualitas Lingkungan Hidup, terdapat hanya satu kegiatan yaitu Kegiatan Rehabilitasi Perairan Darat, dan pada Program Dukungan Manajemen juga hanya terdapat satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan. Adapun pengampu kegiatan disesuaikan pasca terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru, maka pelaksana atau pengampu kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Ditjen PDASRH mengampu kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan;
2. Direktorat Konservasi Tanah dan Air mengampu kegiatan Konservasi Tanah dan Air;
3. Direktorat Rehabilitasi Hutan mengampu kegiatan Rehabilitasi Hutan;
4. Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mengampu kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
5. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan mengampu kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan; dan
6. Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove mengampu kegiatan Rehabilitasi Perairan Darat dan kegiatan Rehabilitasi Mangrove.

Dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), maka perumusan output dibagi dalam Output Program, Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) dan Rincian Ouput (RO). Output program identik dengan indikator kinerja program yang telah dijabarkan sebelumnya sedangkan KRO dan RO disusun sebagai output riil dari kegiatan yang dilaksanakan. Pada Ditjen PDASRH terdapat 26 (dua puluh enam) RO yang termasuk kedalam 6 (enam) KRO, data lengkap RO sebagaimana

*Tabel 3* berikut.

Tabel 3. Kegiatan, KRO dan RO

<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>	<b>RO</b>	<b>Target Renstra</b>	<b>Satuan</b>
<b>Konservasi Tanah dan Air</b>	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Fasilitasi dan Pembinaan Pengendalian Rehabilitasi DAS	15.000	Hektar
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis	3.000	Unit
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi Pembinaan Konservasi Tanah dan Air	34	Lembaga
	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Fasilitasi Konservasi Tanah dan Air Provinsi Jambi melalui Forest Program II	2	Unit
<b>Rehabilitasi Hutan</b>	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	35.000	Hektar
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	1.500	Hektar
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi hutan	34	Lembaga
	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Palu dan Lariang Hulu Sulteng melalui Forest Program III	1	Unit
	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Mamasa melalui Forest Program IV	3	Unit
<b>Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan</b>	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Benih Berkualitas dan Benih Produktif	67,5 jt	unit
	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Benih Berkualitas	60 jt	unit

<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>	<b>RO</b>	<b>Target Renstra</b>	<b>Satuan</b>
<b>Rehabilitasi Mangrove</b>	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Sumber Benih Unggul yang Dibangun	100	Hektar
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan	36	Lembaga
<b>Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai</b>	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Rehabilitasi hutan mangrove	1.250	Hektar
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi Mangrove	34	Lembaga
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Kelompok Kerja Mangrove dan Forum Peduli Mangrove yang Meningkat Kapasitasnya	34	Lembaga
<b>Rehabilitasi Perairan Darat</b>	UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time	34	Sistem Informasi
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga/Forum Peduli DAS yang Meningkat Kapasitasnya	34	Lembaga
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi Pembinaan Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS	34	Lembaga
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDASRH</b>	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Danau yang Dikendalikan Kerusakannya	15	Unit
	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Segmen Sungai yang Dikendalikan Kerusakannya	15	Unit
	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Mata Air yang Dipulihkan	50	Unit
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat	170	Unit
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi Perairan Darat	34	Lembaga
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	37	Layanan
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	37	Layanan

## Kegiatan Konservasi Tanah Dan Air

### Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif

Bimbingan teknis pelaksanaan Rehabilitasi DAS akibat penggunaan kawasan hutan oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan



### Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis

Pembuatan Bangunan KTA berupa Dam Penahan dan Gully Plug



### Fasilitasi Pembinaan Konservasi Tanah dan Air

- Perencanaan, data informasi KTA,
- Bimtek, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi,
- Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan



### Forest Program II

- RHL (vegetatif dan bangunan konservasi tanah)
- Pemodelan DAS / Pengelolaan DAS Berbasis Desa
- Penguatan forum DAS
- Monitoring karbon
- Manajemen proyek

## Kegiatan Rehabilitasi Hutan

### Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif

- Kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman reboisasi
- Kebun Bibit Rakyat dan Kebun Bibit Desa
- Kegiatan pendukung RHL secara vegetatif



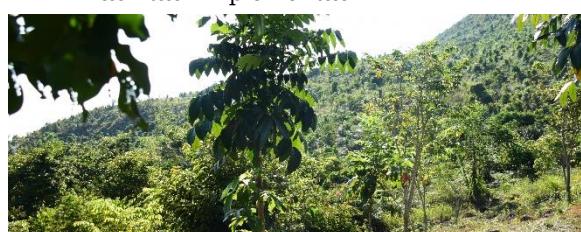
### Forest Program IV

- Penguatan Kerjasama Para Pemangku Kepentingan
- Penguatan Pengelolaan Hutan di KPH
- Pemberdayaan Masyarakat sekitar DAS Mamasa
- Manajemen Operasional proyek



### Forest Program III

- Fasilitasi Implementasi FP III



### Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya

RHL secara vegetative yang dilaksanakan di IKN dan DAS sekitarnya



### Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi hutan

- Perencanaan, data informasi KTA,
- Bimtek, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi,
- Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

## Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan



### Fasilitasi Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan

- Perencanaan, data informasi Perbenihan,
- Bimtek, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi,
- Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan



### Benih Berkualitas

Penyediaan Benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat

### Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif

- Produksi dan Distribusi Bibit Berkualitas
- Penyediaan Bibit Produktif
- Pembangunan Persemaian Modern



### Sumber Benih Unggul yang Dibangun

- Pembangunan Sumber Benih Unggul
- Pemeliharaan KBS/KBK/ASDG



## Kegiatan Rehabilitasi Mangrove



### Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi Mangrove

- Perencanaan, data informasi Rehabilitasi Mangrove,
- Bimtek, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi,
- Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan



### Rehabilitasi Hutan Mangrove

- Penanaman dan Pemeliharaan Mangrove

Kelompok Kerja Mangrove dan Forum Peduli Mangrove yang Meningkat Kapasitasnya

- Fasilitasi penguatan Kelompok Kerja Mangrove dan Forum Peduli Mangrove



## Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS

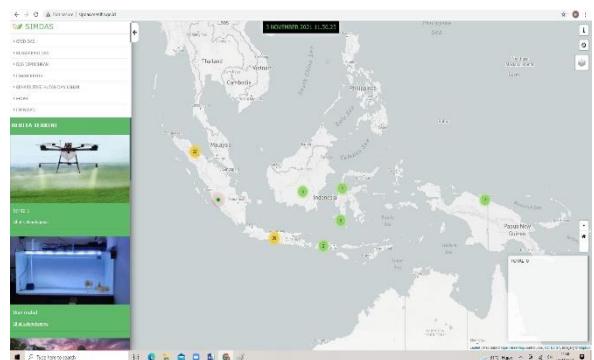


### Fasilitasi Pembinaan Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS

- Pembinaan Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS
- Rencana Indikasi program berbasis DAS
- Bimbingan Teknis, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
- Sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan DAS

### Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time

- Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS
- Rencana Indikasi program berbasis DAS



### Lembaga/Forum Peduli DAS yang Meningkat Kapasitasnya

- Pengembangan kelembagaan/forum peduli DAS

## Kegiatan Rehabilitasi Perairan Darat

### Danau yang Dikendalikan Kerusakannya



### Segmen Sungai yang Dikendalikan Kerusakannya

- Pemantauan dan evaluasi implementasi RP Danau
- Pembangunan Kampung Ramah Air Hujan
- Identifikasi dan penilaian kerusakan sempadan sungai
- Ailih usaha penyelamatan danau



### Mata Air yang Dipulihkan

- Penyusunan Profil Sumber Mata Air dan Penyusunan Rencana Pembangunan Model KRAH



### Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat

- Pembangunan Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat berupa IPAH, Ekohidrolika, Sumur Resapan Air, dan Biopori



### Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi Perairan Darat

- Perencanaan dan data informasi
- Bimbingan Teknis, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
- Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

## **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan**

### **Layanan Umum**

- Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
- Layanan Dukungan Manajemen Satker



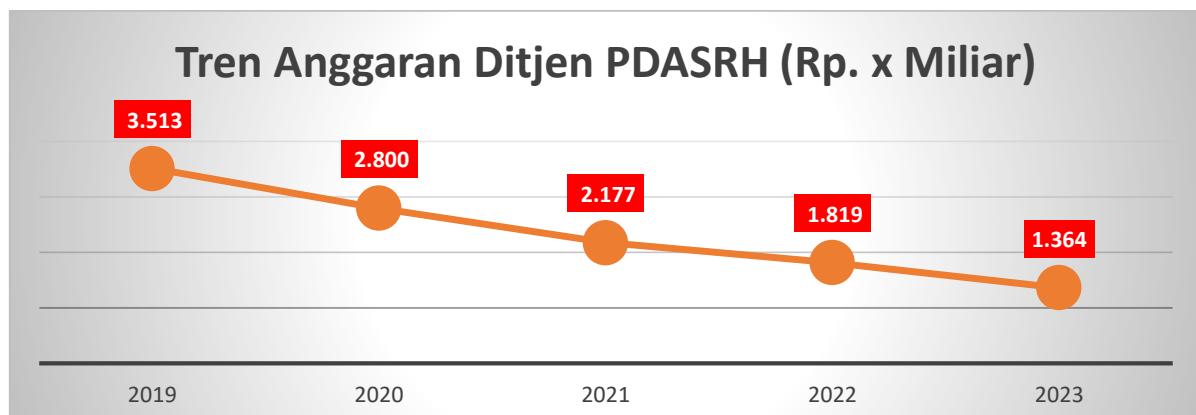
### **Layanan Perkantoran**

- Gaji dan Tunjangan
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor

## B. Anggaran

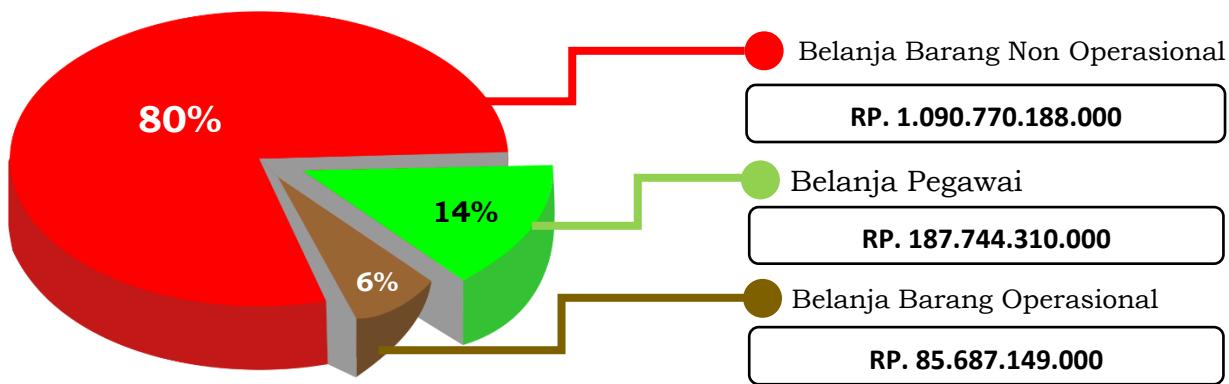
Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-821/MK.02/2022 tanggal 4 Oktober 2022 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp. 6.912.784.958.000**; Dan Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PDASRH berdasarkan Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor M.38/MENLHK/SETJEN/REN.0/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2023 adalah sebesar **Rp.1.364.201.647.000**; Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PDASRH setara dengan 19.73% anggaran Kementerian Lingkungan Hidup.

Tren Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PDASRH

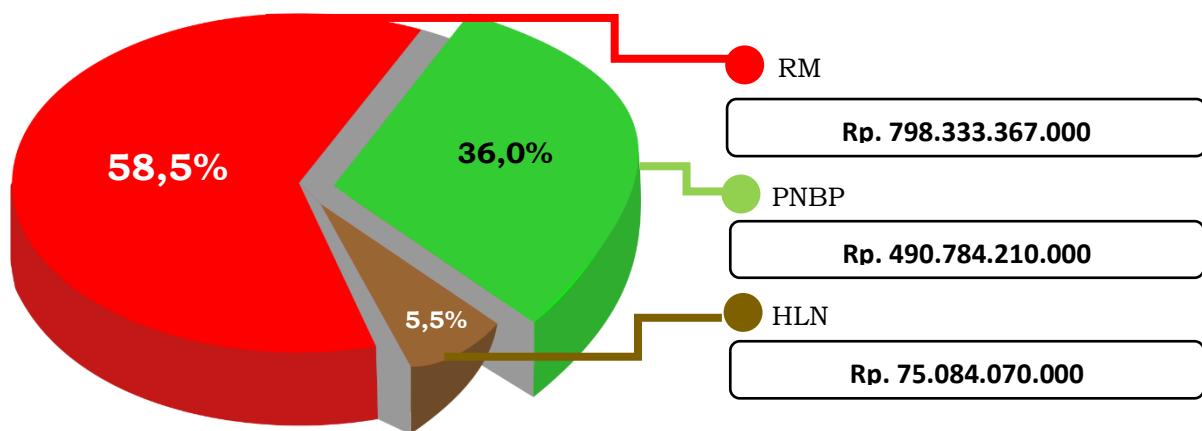


Tren Pagu Alokasi Anggaran pada Ditjen PDASRH mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Penurunan pagu alokasi anggaran memang disebabkan banyak faktor, namun faktor yang paling besar berdampak pada pagu alokasi anggaran adalah pandemi Covid-19, dimana anggaran yang ada difokuskan untuk penanggulangan pandemi hingga pemulihan ekonomi nasional.

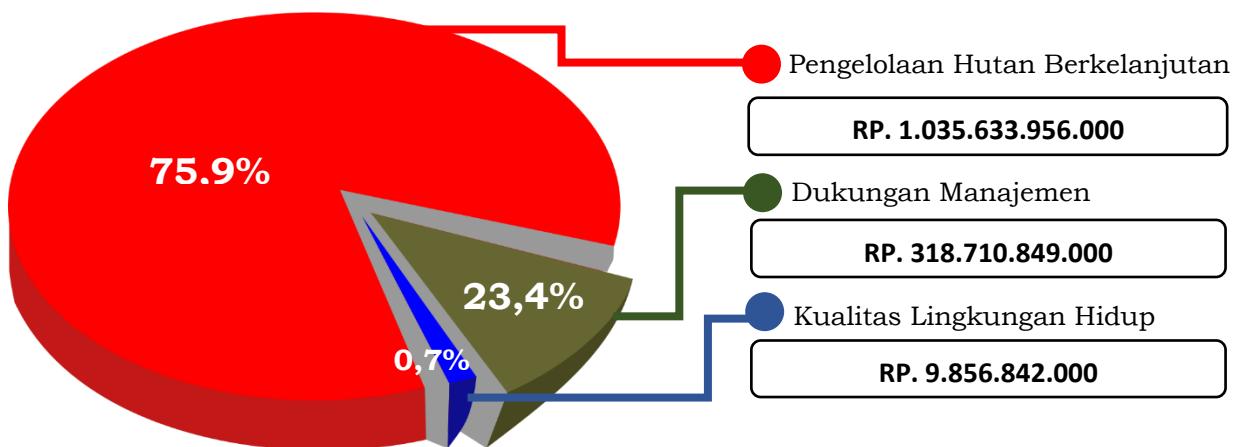
Untuk tahun 2023, Pagu Alokasi Anggaran untuk Ditjen PDASRH adalah yang terendah dari empat tahun terakhir. Tahun 2023 Anggaran Negara masih di optimalkan untuk pemulihan ekonomi nasional. Adapun profil anggaran Ditjen PDASRH adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Anggaran Per Jenis Belanja



Gambar 3. Anggaran Per Sumber Dana



Gambar 4. Anggaran Per Program

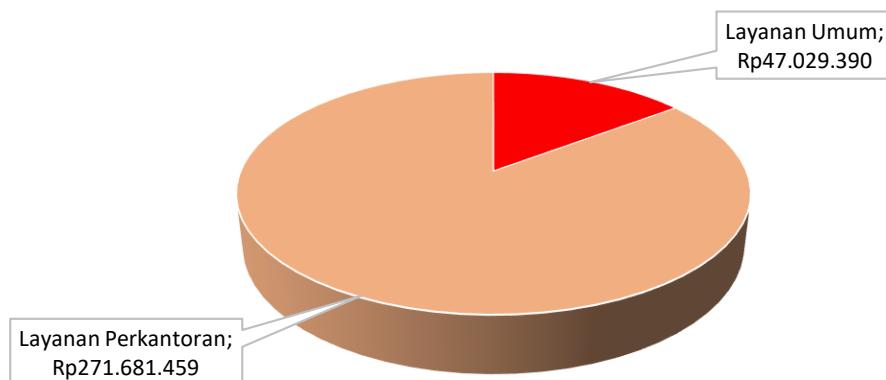
# 1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDASRH,

Alokasi Anggaran Rp. 318.710.849.000

---

Pagu Alokasi Anggaran (Ribu Rupiah)



Ouput yang akan dicapai

---



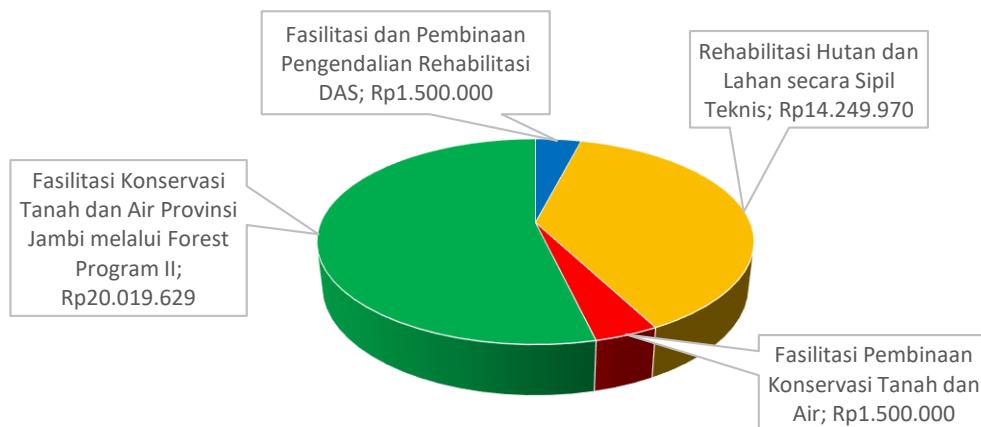
## 2. Direktorat Konservasi Tanah dan Air

Kegiatan Konservasi Tanah dan Air,

Alokasi Anggaran Rp. 37.269.599.000

---

Pagu Alokasi Anggaran (Ribu Rupiah)



Ouput yang akan dicapai

---

Fasilitasi dan Pembinaan Pengendalian Rehabilitasi DAS

- 15.000 Hektar

Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis

- 750 Unit

Fasilitasi Pembinaan Konservasi Tanah dan Air

- 34 Lembaga

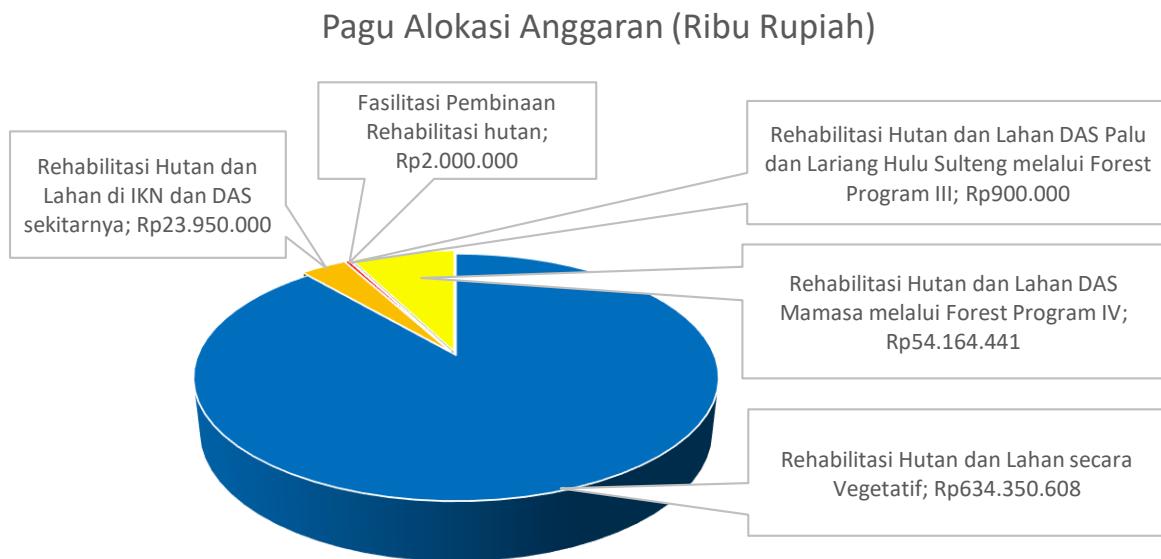
Forest Program II

- 2 Unit

### 3. Direktorat Rehabilitasi Hutan

Kegiatan Rehabilitasi Hutan,

Alokasi Anggaran Rp. 715.365.049.000



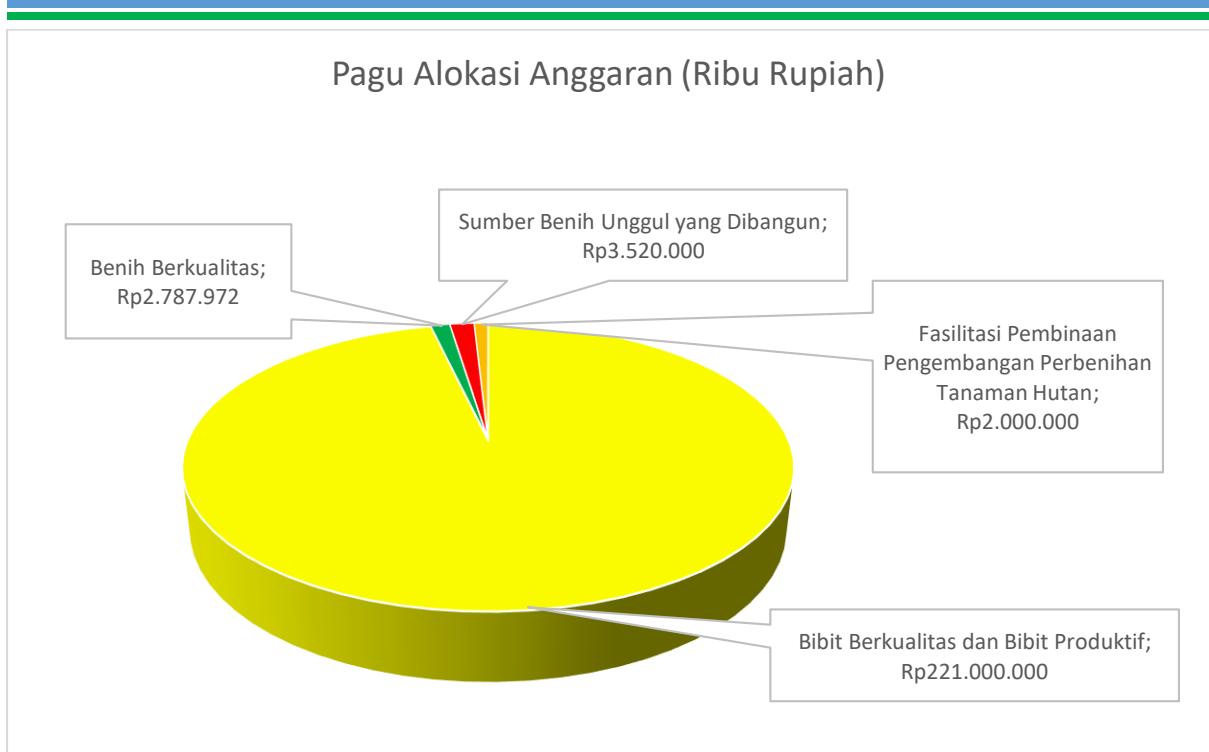
Ouput yang akan dicapai

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif
  - 12.000 Hektar
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya
  - 500 Hektar
- Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi hutan
  - 34 Lembaga
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Palu dan Lariang Hulu Sulteng melalui Forest Program III
  - 1 Unit
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Mamasa melalui Forest Program IV
  - 3 Unit

## 4. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan

Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan,

Alokasi Anggaran Rp. 229.307.972.000



Ouput yang akan dicapai

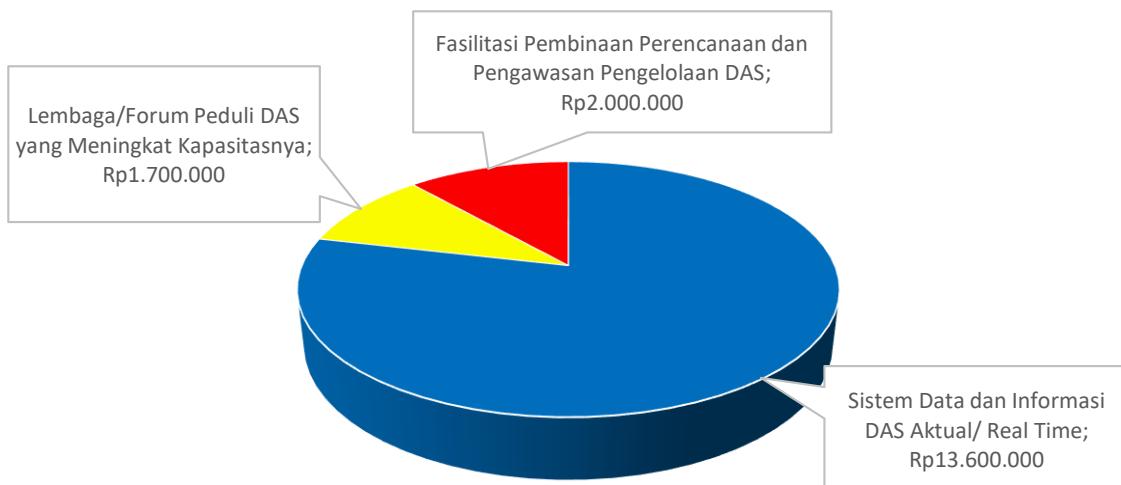
- Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif
  - 41.800.000 Batang
- Benih Berkualitas
  - 37.500.000 Butir
- Sumber Benih Unggul yang Dibangun
  - 10 Hektar
- Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan
  - 36 Lembaga

## **5. Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai**

Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai,

Alokasi Anggaran Rp. 17.300.000.000

Pagu Alokasi Anggaran (Ribu Rupiah)



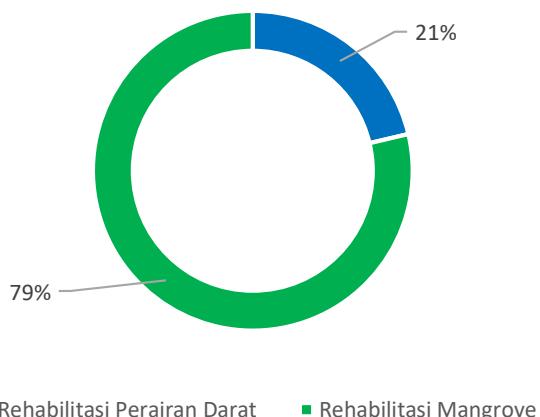
Ouput yang akan dicapai

- Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time
  - 34 Sistem Informasi
- Lembaga/Forum Peduli DAS yang Meningkat Kapasitasnya
  - 34 Lembaga
- Fasilitasi Pembinaan Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS
  - 34 Lembaga

## 6. Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove

Alokasi Anggaran Rp. 46.248.178.000

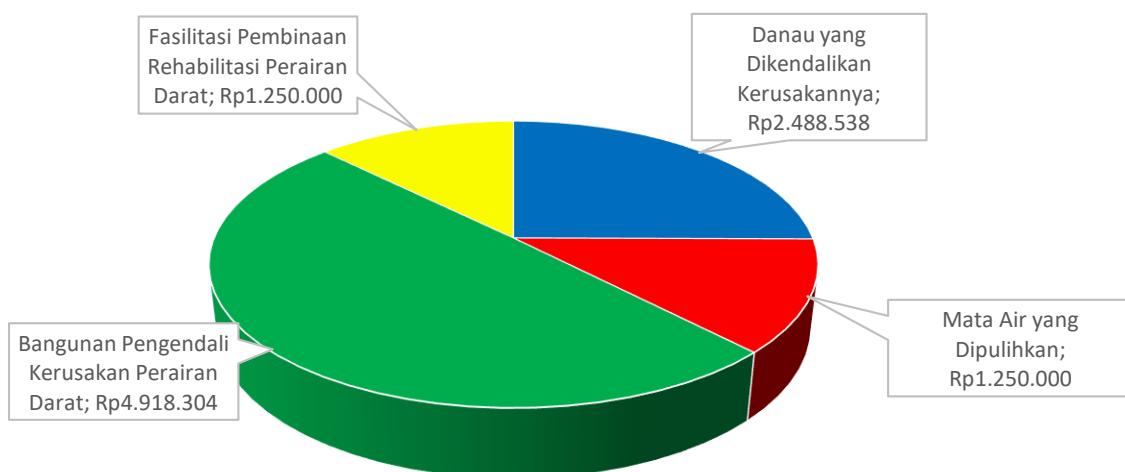
Pagu Alokasi Anggaran (Ribu Rupiah)



Kegiatan Rehabilitasi Perairan Darat,

Alokasi Anggaran Rp.9.856.842;

Pagu Alokasi Anggaran (Ribu Rupiah)



## Ouput yang akan dicapai

---

Danau yang Dikendalikan Kerusakannya

•15 Danau

Mata Air yang Dipulihkan

•50 Mata Air

Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat

•400 Unit

Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi Perairan Darat

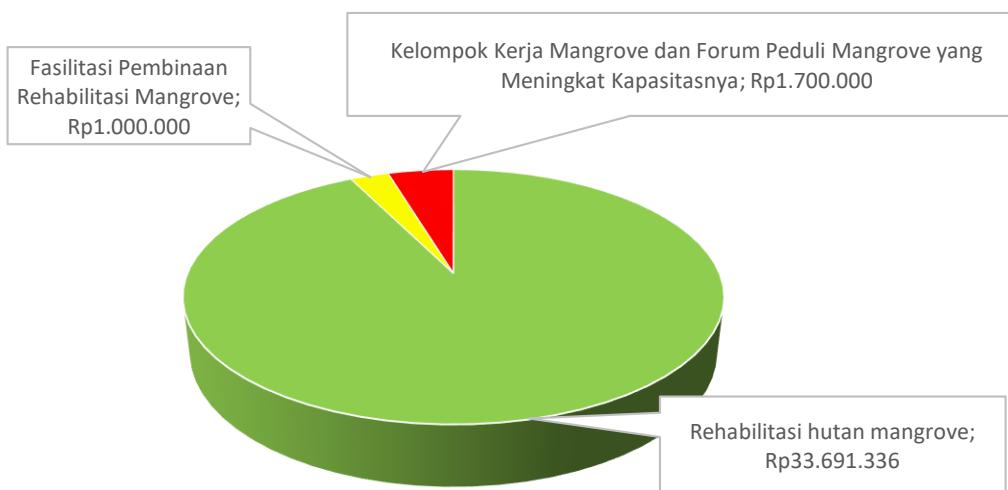
•34 Lembaga

Kegiatan Rehabilitasi Mangrove,

Alokasi Anggaran Rp. 36.391.336.000;

---

Pagu Alokasi Anggaran (Ribu Rupiah)



## Ouput yang akan dicapai



Tabel 4. Pagu Alokasi Anggaran per Rincian Output

Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PAGU (Ribu Rupiah)
<b>Konservasi Tanah dan Air</b>	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Fasilitasi dan Pembinaan Pengendalian Rehabilitasi DAS	15.000	Hektar	1.500.000
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis	750	Unit	14.249.970
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi Pembinaan Konservasi Tanah dan Air	34	Lembaga	1.500.000
	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Fasilitasi Konservasi Tanah dan Air Provinsi Jambi melalui Forest Program II	2	Unit	20.019.629
<b>Rehabilitasi Hutan</b>	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	12.000	Hektar	634.350.608
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	500	Hektar	23.950.000
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi hutan	34	Lembaga	2.000.000

<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>	<b>RO</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>PAGU (Ribu Rupiah)</b>
<b>Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan</b>	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Palu dan Lariang Hulu Sulteng melalui Forest Program III	1	Unit	900.000
	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Mamasa melalui Forest Program IV	3	Unit	54.164.441
<b>Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan</b>	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Bitit Berkualitas dan Bitit Produktif	41,8 Juta	unit	221.000.000
	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Benih Berkualitas	37,5 Juta	unit	2.787.972
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Sumber Benih Unggul yang Dibangun	10	Hektar	3.520.000
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan	36	Lembaga	2.000.000
<b>Rehabilitasi Mangrove</b>	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Rehabilitasi hutan mangrove	700	Hektar	33.691.336
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi Mangrove	34	Lembaga	1.000.000
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Kelompok Kerja Mangrove dan Forum Peduli Mangrove yang Meningkat Kapasitasnya	34	Lembaga	1.700.000
<b>Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai</b>	UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time	34	Sistem Informasi	13.600.000
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga/Forum Peduli DAS yang Meningkat Kapasitasnya	34	Lembaga	1.700.000
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi Pembinaan Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS	34	Lembaga	2.000.000
<b>Rehabilitasi Perairan Darat</b>	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Danau yang Dikendalikan Kerusakannya	15	Unit	2.488.538
	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Mata Air yang Dipulihkan	50	Unit	1.250.000

<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>	<b>RO</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>PAGU (Ribu Rupiah)</b>
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat	400	Unit	5.118.304
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi Perairan Darat	34	Lembaga	1.000.000
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDASRH</b>	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	37	Layanan	47.029.390
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	37	Layanan	271.681.459

## C. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (mainstreaming) dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Mengacu RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) KLHK Tahun 2020-2024, pada tahun 2023, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tentunya akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola (*mainstreaming*), dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rincian sebagai berikut: 1). Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan; 2). Pengarustamaan Gender 3). Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya; 4). Pengarustamaan Trasformasi Digital.

Pembangunan berkelanjutan merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang melibatkan partisipasi masyarakat serta kolaborasi setiap pihak. Mencakup tujuh belas tujuan termasuk kerentanan bencana perubahan iklim serta tata kelola pemerintahan yang baik.

**Tujuan  
Pembangunan  
Berkelanjutan**

**Gender**

**Transformasi  
Digital**

**Modal Sosial dan  
Budaya**

Pengarustamaan gender (PUG) Bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

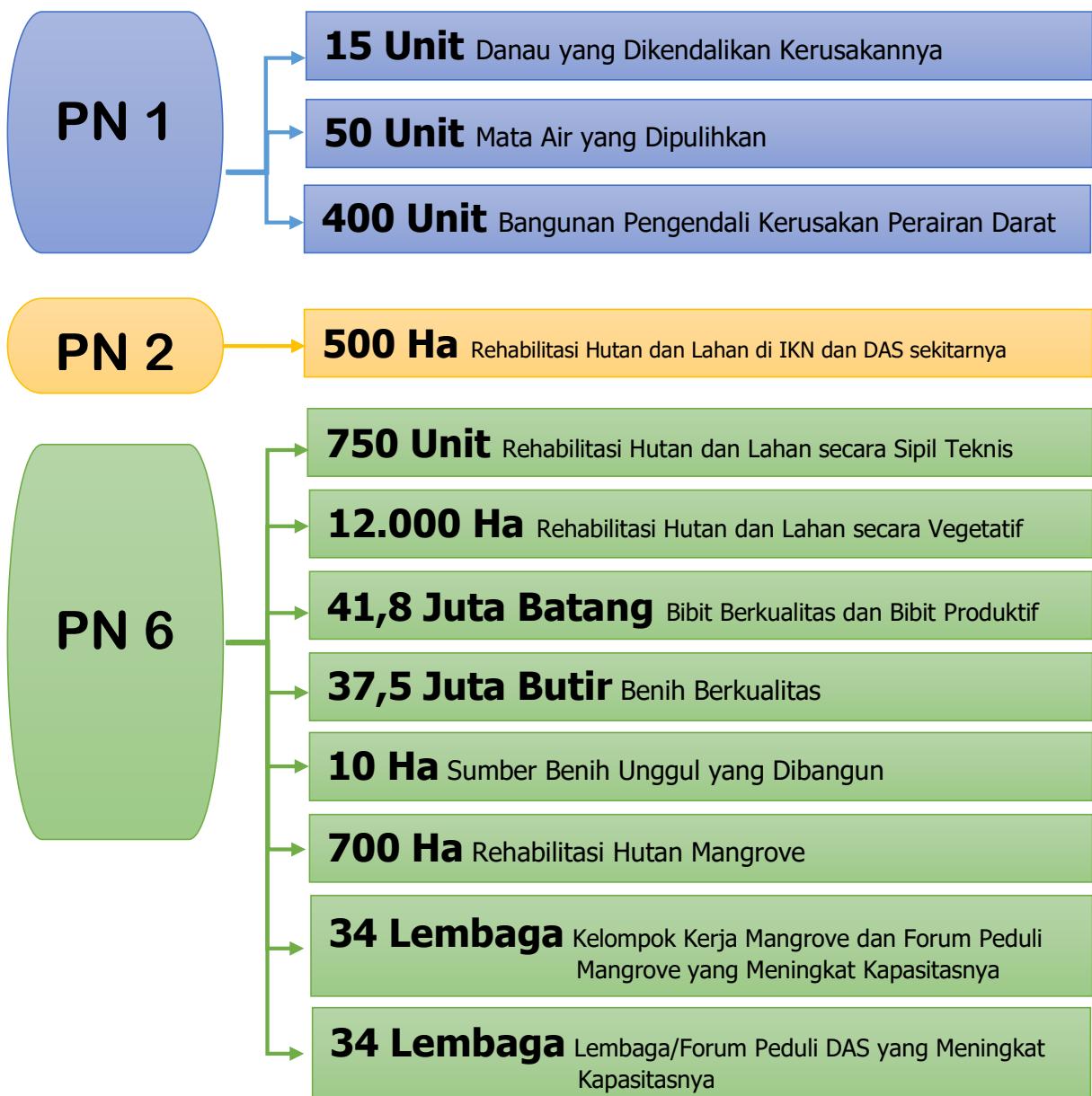
Pengetahuan lokal (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial dimasyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai social budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional



## D.Dukungan Pembangunan Nasional

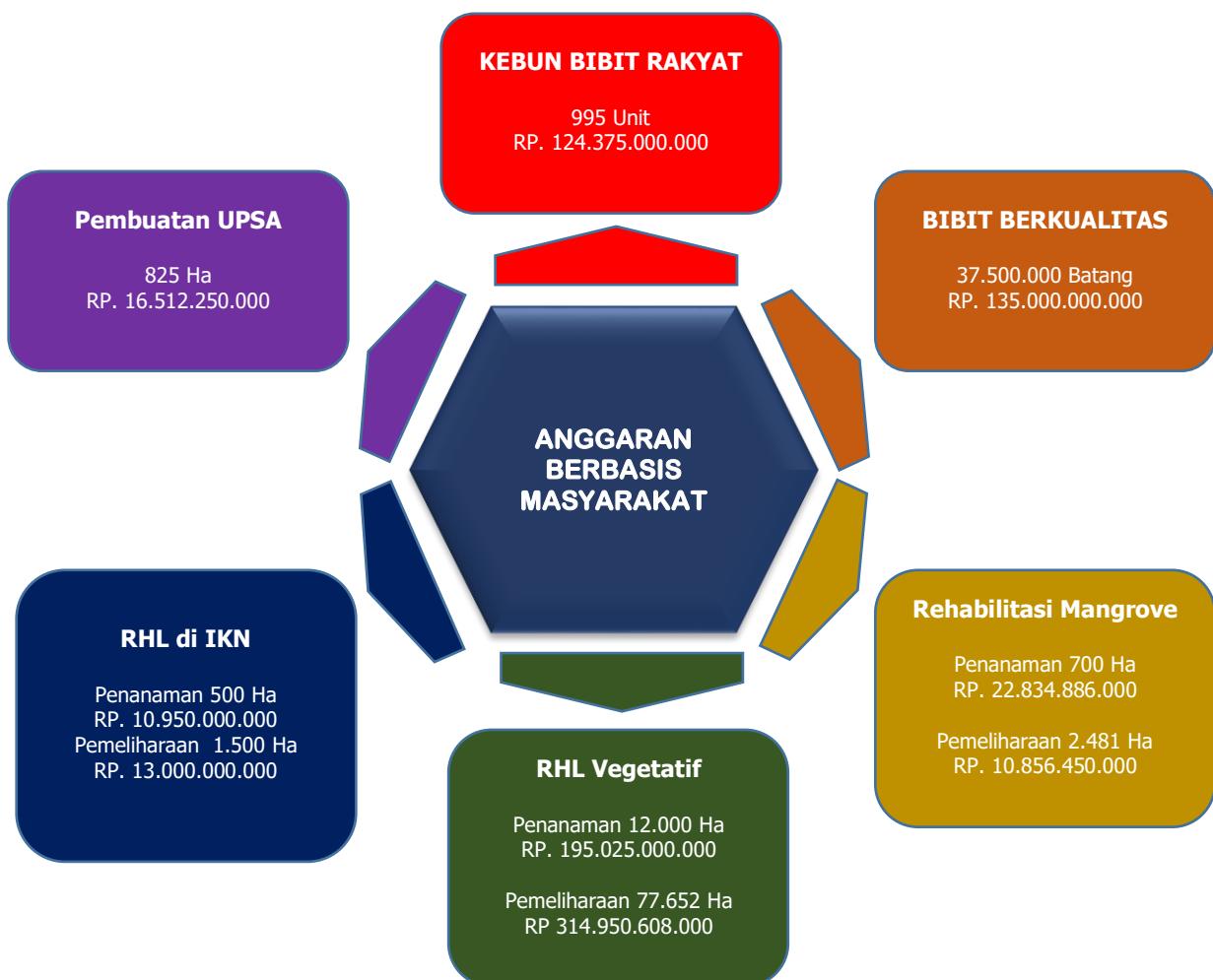
Dalam RKP Tahun 2023, KLHK mendapat amanat untuk turut serta mendukung Agenda Pembangunan Nasional/Prioritas Nasional (PN). Dari 7 (tujuh) PN, KLHK mendukung di 4 (empat) PN yaitu : (PN1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, (PN2) pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (PN3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan (PN 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Dari 4 Prioritas Nasional yang didukung oleh KLHK, Ditjen PDASRH mendukung 3 Prioritas Nasional diantaranya yaitu PN 1, PN 2 dan PN 6.



## E. Anggaran Berbasis Masyarakat

Selain capaian target kegiatan yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan harus dapat memberikan benefit bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selaras dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, Ditjen PDASRH melaksanakan kegiatan berbasis masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan memberikan dampak dalam jangka pendek secara langsung kepada masyarakat dengan adanya upah harian dari pelaksanaan kegiatan, dan dalam jangka panjang, secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terbangunnya faktor produksi untuk ekonomi masyarakat. Kegiatan berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Ditjen PDASRH antara lain yaitu Kebun Bibit Rakyat, Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif, Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif, dan Rehabilitasi Hutan Mangrove. Anggaran Berbasis Masyarakat pada Ditjen PDASRH Tahun 2023 sebesar Rp. 843.504.194.000.



## **IV. Penutup**

Rencana Kerja Ditjen PDASRH Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Renja Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.

Pengelolaan DAS harus terintegrasi lintas sektor, lintas disiplin ilmu dan lintas wilayah administrasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengendalian dan evaluasinya.

Dengan adanya redesain sistem perencanaan dan penganggaran dan SOTK Baru, maka program yang diemban oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan capaian dari beberapa unit eselon I, sehingga koordinasi dan sinergi antar unit kerja eselon I mutlak diperlukan agar tercapai tujuan dari program KLHK.

Rencana kerja ini diharapkan mampu memberikan arahan dan acuan agar dapat ditindaklanjuti berupa rencana kerja eselon II dan Satker Unit Pelaksana Teknis serta dapat mengidentifikasi rencana aksi untuk mencapai capaian kinerja Ditjen PDASRH dalam memberikan sumbangsih yang nyata bagi pembangunan nasional khususnya pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, serta turut meningkatkan peran dan fungsi hutan sebagai salah satu anugerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.